

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARINGAN GAS BUMI
DI KOTA PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :
MUHAMAD REZA FARIZKY
07011181419046**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARINGAN GAS BUMI
DI KOTA PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

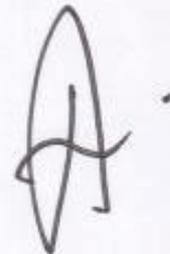
Oleh :

**MUHAMAD REZA FARIZKY
07011181419046**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 23 Oktober 2018

Pembimbing I

**Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001**



Pembimbing II

**Hoirun Nisyak, S.Pd, M.Pd
NIP. 197803022002122002**



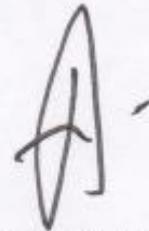
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 14 November 2018.

Inderalaya, 16 November 2018

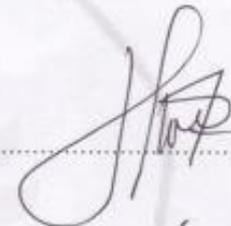
Ketua:

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 19640606 199203 1 001

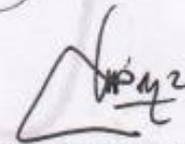


Anggota:

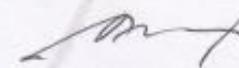
1. Hoirun Nisyak, S.Pd, M.Pd
NIP. 19780302 200212 2 002



2. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 19671201 199203 2 002



3. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125 198912 1 001

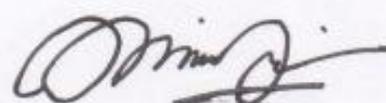


Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1 001

Ketua Jurusan Administrasi Negara



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Veritas Et Scientia, Nobis Lumen.” (Kebenaran dan Ilmu Pengetahuan, Cahaya Hidup Kita)

“Ad Veritatem Per Caritatem.” (Capai Kebenaran Dengan Kasih dan Cinta)

“Lakukanlah yang baik dengan sebaik – baiknya dan lakukanlah yang benar dengan sebenar – benarnya.” (Muhamad Reza Farizky)

Dengan rahmat Tuhan YME, skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku tercinta,
- Adik – adik ku tersayang,
- Teman – teman, mahasiswa/i Administrasi Negara FISIP 2014,
- Almamater kebanggaanku.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak optimalnya pengoperasian dan pengelolaan jaringan gas bumi karena adanya kesenjangan yang besar di antara jumlah sambungan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Prabumulih dengan jumlah pegawai PD. Petro Prabu yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Pada dimensi komunikasi, proses penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi belum berjalan dengan baik. Pada dimensi sumber daya terdapat kesenjangan di antara jumlah sumber daya manusia dengan jumlah sambungan gas bumi yang dikelola dan informasi yang ada juga belum dikelola dengan baik. Pada dimensi disposisi, penempatan staf telah dilakukan dengan baik, namun belum ada insentif yang diberikan kepada para pegawai PD. Petro Prabu. Pada dimensi struktur birokrasi, pembagian tugas dan wewenang telah dilakukan dengan baik, namun prosedur operasi standar belum dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini memberikan saran agar implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya pemanfaatan teknologi internet untuk menyalurkan komunikasi secara massal kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penambahan pegawai dalam proses implementasi kebijakan ini dan juga perlu adanya pemberian insentif kepada para pegawai yang telah bekerja dengan baik, serta perlu dilakukan restrukturisasi terhadap struktur birokrasi di dalam proses implementasi kebijakan ini.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Jaringan Gas Bumi

Pembimbing 1



Dr. M. Gusni Thamrin, M.Si
NIP. 19640606 199203 1 001

Pembimbing 2

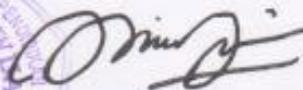


Hoirun Nisrak, S.Pd, M.Pd
NIP. 19780302 200212 2 002

Inderalaya, November 2018

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



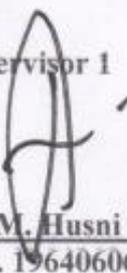

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.PA
NIP. 19810827 200912 1 002

ABSTRACT

This thesis is entitled "Implementation of Natural Gas Network Policy in Prabumulih City". This research is motivated by the nonoptimal operation and management of natural gas network because there is a huge gap between the number of natural gas network for households in Prabumulih city with the number of the employees of PD. Petro Prabu as the implementor of this policy. This research aims to find out the Implementation of Natural Gas Network Policy in Prabumulih city. This research uses the theory of the public policy implementation according to George C. Edward III which covers four dimensions, namely communication, resource, disposition and bureaucratic structure. The type of this research is descriptive qualitative. Data collection method is by interview, documentation and observation. Based on the results of this research indicate that the communication, resource, disposition and bureaucratic structure have not gone well. In the dimension of communication, the process of the communication transmission, communication clarity and communication consistency have not gone well. In the dimension of resource there is a gap between the number of human resources with the number of managed natural gas network and the information has not been managed properly. In the dimension of disposition, the staff placement has been done well, but there is no incentive given to the employees of PD. Petro Prabu. In the dimension of bureaucratic structure, the division of duties and authority has been done well, but the standard operating procedure has not been done well. This research gives recommendations that the implementation of Natural Gas Network in Prabumulih city can run well, it is necessary to use internet technology to massively deliver the communication to the public. In addition, it is necessary to add the number of the employees in the process of the implementation of this policy and it is necessary to provide incentives to the employees who have worked well and it is also necessary to restructure the bureaucratic structure in the process of the implementation of this policy.

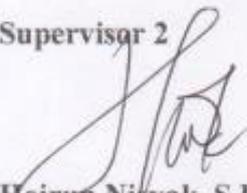
Keywords : Public Policy Implementation, Natural Gas Network

Supervisor 1



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 19640606 199203 1 001

Supervisor 2

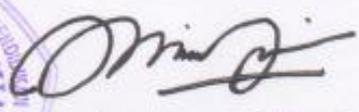


Hoiran Nisyak, S.Pd, M.Pd
NIP. 19780302 200212 2 002

Inderalaya, November 2018

Chairman of The Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science




Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.PA
NIP. 19810827 200912 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar – besarnya penulis ungkapkan kepada Tuhan YME yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesempatan dalam penulisan dan penyusunan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih”.

Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penelitian ini berfokus pada kegiatan implementasi kebijakan, yaitu Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih.

Dalam proses penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis sadar bahwa banyak kendala yang dihadapi. Namun, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak kendala – kendala tersebut dapat diatasi. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsri dan Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsri,
3. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses akademik dan dalam penyusunan penelitian ini,
4. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasehat yang sangat berguna dalam penulisan penelitian ini,
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasehat yang sangat berguna dalam penulisan penelitian ini,
6. Kedua orang tua dan saudara – saudara penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa,
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unsri yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kegiatan belajar dan mengajar di bangku kuliah,
8. Seluruh pegawai PD. Petro Prabu yang telah membantu penulis dalam memberikan kelengkapan data – data guna menyelesaikan penelitian ini,
9. Seluruh teman – teman satu angkatan Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2014 yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.

Penulis sangat menghargai semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh pihak – pihak tersebut dan berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian ilmu administrasi negara

Indralaya, November 2018

Penulis,

Muhamad Reza Farizky

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	12
1. Kebijakan Publik	12
2. Implementasi Kebijakan Publik	14
3. Jaringan Gas Bumi Indonesia	20
B. Teori yang Digunakan	21
C. Penelitian Terdahulu	22
D. Kerangka Teori	23
E. Kerangka Pemikiran	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Aspek Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Teknik Penentuan Informan	36
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Teknik Pemeriksaan Data	38
I. Teknik Analisis Data	39

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	40
1. Gambaran Umum Kota Prabumulih	40
2. Profil Perusahaan Daerah Petro Prababu	43

3. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Petro Prabu	46
4. Tugas dan Wewenang Pegawai PD. Petro Prabu	46
5. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Petro Prabu	51
6. Logo Perusahaan Daerah Petro Prabu	52
B. Hasil Pembahasan	53
1. Komunikasi	53
a. Penyaluran Komunikasi	54
b. Kejelasan Komunikasi	60
c. Konsistensi Komunikasi	62
2. Sumber Daya	64
a. Staf	64
b. Informasi	67
c. Wewenang	69
d. Fasilitas	73
3. Disposisi	77
a. Penempatan Staf	77
b. Insentif	80
4. Struktur Birokrasi	81
a. Prosedur Pelaksanaan	82
b. Pembagian Tugas dan Wewenang	85
C. Matriks Hasil Penelitian	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tahapan Pembangunan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih	2
2. Persebaran Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih	4
3. Perbandingan Jumlah Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih dengan Jumlah Petugas Pencatat Meter Gas	7
4. Jumlah Keluhan Warga Penerima Manfaat Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih kepada PD. Petro Prabu	9
5. Penelitian Terdahulu	22
6. Fokus Penelitian.....	33
7. Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Prabumulih	41
8. Jenis Karyawan di PD. Petro Prabu	65
9. Latar Belakang Pengalaman / Pendidikan Pegawai PD. Petro Prabu	66
10. Pembagian Ruangan di Kantor PD. Petro Prabu	74
11. Fasilitas Prasarana di Kantor PD. Petro Prabu	75
12. Pembagian Tugas dan Jabatan Pegawai PD. Petro Prabu	78
13. Hasil Tindak Lanjut PD. Petro Prabu Terhadap Pengaduan Pelanggan	84
14. Tim Pencabutan Jaringan Gas Bumi yang Menunggak Pembayaran	85
15. Matriks Hasil Penelitian	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III	16
2. Skema Kerangka Pemikiran	30
3. Peta Kota Prabumulih	42
4. Foto Kantor PD. Petro Prabu	43
5. Papan Nama Kantor PD. Petro Prabu	45
6. Struktur Organisasi PD. Petro Prabu	51
7. Logo PD. Petro Prabu	52
8. Alur Komunikasi dalam Proses Pencatatan Meter Pemakaian Gas Bumi hingga Pembayaran Tagihan Pemakaian Gas Bumi	55
9. Alur Sosialisasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi kepada Warga Kota Prabumulih	56
10. Form Layanan Pengaduan dan Keluhan Warga Pemakai Jaringan Gas Bumi	57
11. Alur Komunikasi Pengaduan dan Keluhan Warga Pemakai Jaringan Gas Bumi	58
12. Penampakan Halaman <i>Website</i> PD. Petro Prabu	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Surat Balasan Izin Penelitian dari PD. Petro Prabu
4. Kartu Bimbingan Skripsi
5. Lembar Revisi Sidang Komprehensif
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
7. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 152 Tahun 2013
8. Foto – Foto Penelitian
9. Pedoman Wawancara
10. Pedoman Observasi
11. Pedoman Dokumentasi

DAFTAR SINGKATAN

<i>LPG</i>	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ABI	: Anggaran Biaya Investasi
PBM	: Prabumulih
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
PT	: Perseroan Terbatas
<i>EP</i>	: <i>Exploration Production</i>
PD	: Perusahaan Daerah
SR	: Sambungan Rumah
<i>HSE</i>	: <i>Health, Safety and Environment</i>
DTT	: Distribusi Tekanan Tinggi
DTM	: Distribusi Tekanan Menengah
DTR	: Distribusi Tekanan Rendah
SDM	: Sumber Daya Manusia
Inpres	: Instruksi Presiden
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Ditjen	: Direktorat Jendral
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
<i>FEED</i>	: <i>Front End Engineering Design</i>
<i>DEDC</i>	: <i>Detailed Engineering and Design Consultant</i>
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
<i>SPV</i>	: <i>Supervisor</i>
RKT	: Rambang Kapak Tengah
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
Kabag	: Kepala Bagian
<i>SOP</i>	: <i>Standard Operating Procedure</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan jaringan gas bumi di suatu wilayah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menggantikan penggunaan minyak bumi yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar gas bumi untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil. Kebijakan ini disebut Kebijakan Jaringan Gas Bumi.

Jaringan gas bumi untuk rumah tangga berarti mengalirkan gas melalui jaringan pipa hingga ke rumah tangga. Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta kebijakan komplementer konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi.

Peningkatan pemanfaatan energi alternatif, khususnya gas bumi adalah upaya untuk mengurangi pemanfaatan minyak bumi dalam rangka memenuhi target diversifikasi energi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan pemerintah untuk mengkonversi gas bumi menjadi gas rumah tangga agar manfaat gas bumi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan pemasangan jaringan gas rumah tangga dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia dengan memperhatikan kuota gas dan kebutuhan setiap daerah. Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota - kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.

15 Jaringan gas untuk rumah tangga di beberapa wilayah di Indonesia dibangun menggunakan dana dari APBN. Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat berperan serta dan mewujudkan daerahnya menjadi kota gas di masa mendatang.

Di Sumatera Selatan, pelaksanaan pembangunan jaringan gas rumah tangga dilakukan di beberapa daerah, seperti Palembang, Prabumulih dan Ogan Ilir. Salah satu jaringan gas kota yang dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Sumatera Selatan adalah jaringan gas kota di Kota Prabumulih yang merupakan jaringan gas kota terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 38.000 sambungan untuk rumah tangga. Kebijakan ini memiliki tujuan agar masyarakat Kota Prabumulih dapat menggunakan gas dengan lebih murah, aman dan efisien.

Pada periode 2009 - 2012, ada beberapa kota/kabupaten yang telah dialiri jaringan gas rumah tangga, salah satunya adalah Kota Prabumulih yang jumlah pemasangan jaringan gas rumah tangga yang beragam sesuai dengan neraca gas bumi dan kuota gas bumi di Kota Prabumulih. Pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih dimulai sejak tahun 2013. Pada saat itu, pembangunan jaringan gas bumi dicantumkan di dalam penganggaran APBN tahun 2013. Tahap ini disebut dengan Jaringan Gas Bumi PBM I. Selain itu, dengan dana dari ABI PT. Pertamina Persero, dibangun juga jaringan gas bumi di Kota Prabumulih yang disebut Jaringan Gas Bumi PBM 2 pada tahun 2014.

Tabel 1. Tahapan Pembangunan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih

Tahun	Jumlah pemasangan jaringan gas rumah tangga
2013	4.650 SR (Sambungan Rumah)
2014	2.000 SR (Sambungan Rumah)
2015	Tidak dilakukan pemasangan jaringan gas
2016	32.000 SR (Sambungan Rumah)
Total	38.650 SR (Sambungan Rumah)

Sumber : Diolah penulis berdasarkan arsip PD. Petro Prabu

Berdasarkan tabel tersebut, Kota Prabumulih telah dipasang jaringan gas rumah tangga sebanyak 4.650 SR (Sambungan Rumah) pada tahun 2013 sesuai dengan jumlah pemasangan jaringan gas yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM dalam *road map* pembangunan jaringan gas rumah tangga. Pada tahun 2014, kembali dilakukan pemasangan jaringan gas rumah tangga sebanyak 2.000 SR (Sambungan Rumah).

Kemudian, di awal tahun 2016 dilakukan kembali penambahan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih dengan *groundbreaking* pada tanggal 21 Maret 2016. Pembangunan ini disesuaikan dengan jumlah pemasangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM dalam *road map* pembangunan jaringan gas rumah tangga berdasarkan Peta Kebijakan dan Neraca Gas Bumi 12 Region.

Pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih pada tahun 2016 merupakan pembangunan jaringan gas rumah tangga yang terbesar, yaitu sebesar 32.000 sambungan rumah tangga. Prabumulih dipilih karena daerahnya yang dekat dengan sumber gas, memiliki ketersediaan pasokan gas yang berlimpah.

Pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih pada tahun 2016 diputuskan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 4822/K/12/MEM/2015 tentang Penugasan kepada PT. Pertamina (PERSERO) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016 yang kemudian disebut dengan Jaringan Gas Bumi PBM 3.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan sambungan gas rumah tangga di Kota Prabumulih berjumlah 38.650 sambungan. Untuk melihat persebaran jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. Persebaran Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah Tangga
1.	Prabumulih Barat	Gunung Kemala	776
		Muntang Tapus	753
		Patih Galung	2.401
		Prabumulih	1.651
2.	Prabumulih Selatan	Tanjung Raman	1.257
		Sukaraja	1.441
		Tanjung Menang	371
		Maja Sari	1.669
3.	Prabumulih Utara	Mangga Besar	1.653
		Wonosari	2.337
		Anak Petai	794
		Pasar 1	455
		Pasar 2	1.266
4.	Prabumulih Timur	Gunung Ibul	5.501
		Gunung Ibul Barat	1.568
		Sukajadi	1.764
		Muara Dua	2.004
		Tugu Kecil	1.001
		Prabu Jaya	1.954
		Karang Raja	2.177
		Karang Jaya	1.074
5.	Rambang Kapak Tengah	Sinar Rambang	146
		Kemang Tanduk	358
6.	Cambai	Cambai	1.048
		Muara Sungai	608
		Pangkul	923
		Sindur	474
		Sungai Medang	1.226
Jumlah			38.650

Sumber : Diolah penulis berdasarkan arsip PD. Petro Prabu

Jaringan gas bumi yang besar ini harus diimplementasikan dan dioperasikan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti yang dimuat di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah. Di dalam kebijakan ini disebutkan bahwa pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan, termasuk

pengembangan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, serta niaga gas bumi dari produsen dan/atau penjual gas bumi sampai dengan rumah tangga pengguna gas bumi.

Pada pasal 2 di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2015 disebutkan bahwa pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga bertujuan untuk :

- a) Mempercepat diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga, dan
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah.

Kemudian untuk mengimplementasikan dan mendistribusikan Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih menunjuk sebuah Perusahaan Daerah yang salah satu kewenangannya adalah pengelolaan jaringan gas bumi. Perusahaan daerah ini bernama Perusahaan Daerah Petro Prabu yang telah lama dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu.

Melalui Keputusan Walikota Kota Prabumulih Nomor 152/KPTS/DPELH.III/2013, PD. Petro Prabu ditunjuk untuk melakukan pengimplementasian Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih. Namun, peraturan ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara pengimplementasian Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih. Tata cara pengimplementasian Kebijakan Jaringan Gas Bumi ini dimuat di dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Jaringan Gas Kota Untuk Lokasi Prabumulih Antara PT. Pertagas Niaga dengan PD. Petro Prabu Nomor 006/PN1000/2017-S2.

Di dalam surat perjanjian tersebut, terdapat beberapa ruang lingkup pekerjaan dalam pengimplementasian Kebijakan Jaringan Gas Bumi bagi PD Petro Prabu, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pengoperasian terhadap seluruh instrumentasi penyaluran gas bumi untuk menjaga penyaluran gas yang kontinyu kepada masyarakat,
2. Melakukan kegiatan perbaikan atas fasilitas atau infrastruktur jargas yang mengalami kerusakan ataupun kegagalan beroperasi,
3. Melakukan pencatatan atas volume pemakaian tiap konsumen yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar penagihan atas biaya pemakaian gas bulanan,
4. Menyediakan tenaga kerja dengan klasifikasi jenis pekerjaan sebagai berikut :
 - Koordinator tim teknis,
 - Staf administrasi,
 - Staf keuangan,
 - Pencatat meter, teknik dan *maintanance*.
5. Menindaklanjuti setiap keluhan atau laporan pelanggan atas kinerja jargas,
6. Melakukan pengamanan terhadap fasilitas atau infrastruktur jargas,
7. Melakukan penindakan terhadap penunggakan pembayaran oleh pelanggan ataupun segala kondisi yang menyebabkan tidak terutilisasinya infrastruktur jargas untuk dapat menyalurkan gas kepada masyarakat,
8. Melakukan koordinasi dari pelaporan kepada pihak pertama terhadap keseluruhan kondisi yang bersifat teknis maupun non teknis saat pelaksanaan pengelolaan jargas.

Pada poin ketiga, dijelaskan bahwa PD Petro Prabu harus melakukan pencatatan atas volume pemakaian tiap konsumen yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar penagihan atas biaya pemakaian gas bulanan. Namun, terdapat kesenjangan antara jumlah sambungan gas rumah tangga dengan jumlah petugas pencatat meter gas. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih dengan Jumlah Petugas Pencatat Meter Gas

No	Kecamatan	Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga	Jumlah Petugas Pencatat Meter Gas
1.	Prabumulih Barat	5.581	1 orang
2.	Prabumulih Timur	17.043	2 orang
3.	Prabumulih Selatan	4.738	1 orang
4.	Prabumulih Utara	6.505	2 orang
5.	Cambai	4.279	1 orang
6.	Rambang Kapak Tengah	504	1 orang
Jumlah		38.650	8 orang

Sumber : Diolah penulis berdasarkan arsip PD. Petro Prabu

Di dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan antara petugas pencatat meter sambungan gas rumah tangga dengan jumlah sambungan gas rumah tangga yang harus dicatat sangat berbanding terbalik. Sehingga, pencatatan meter pemakaian gas bumi oleh warga tidak berjalan optimal. Hal ini menyebabkan warga tidak dapat membayar pemakaian jaringan gas bumi karena tidak menerima struk tagihan pemakaian gas.

Selain itu, pada poin ketujuh disebutkan bahwa PD. Petro Prabu harus melakukan penindakan terhadap penunggakan pembayaran oleh pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat Kota Prabumulih. Ada sekitar 15.000 lebih jumlah sambungan rumah tangga yang menunggak di tahun 2017, namun tim yang bertugas untuk menindaklanjuti hal ini hanya terdiri dari 4 orang, yaitu 2 orang dari bagian *maintanance*, 1 orang dari bagian operasional dan 1 orang dari bagian *HSE*. Hal inilah yang menyebabkan tindaklanjut terhadap sambungan rumah tangga yang menunggak pembayaran tidak berjalan dengan optimal. Menurut data laporan pengelolaan dan perawatan jaringan gas bumi oleh PD. Petro Prabu, jumlah jaringan gas bumi yang dicabut karena melakukan tunggakan adalah 184 sambungan rumah tangga.

PD. Petro Prabu membuka pelayanan pengaduan keluhan bagi pemakaian jaringan gas bumi di Kantor PD. Petro Prabu. Namun, untuk melayani pengaduan dan keluhan ini, jumlah pegawai yang menerima keluhan pun hanya ada 2 orang yang membuat pelayanan pengaduan keluhan ini berjalan dengan lambat. Keluhan-keluhan yang diajukan ada yang bersifat teknis maupun administratif, yang dikelompokkan per bulan dan dapat dilihat melalui tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 4. Jumlah Keluhan Warga Penerima Manfaat Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih kepada PD. Petro Prabu

Bulan/ Keluhan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
Kebocoran pada jalur pipa gas (DTT, DTM, DTR)	2	1	-	1	2	-	-	3	2	-	1	-
Kebocoran pada jalur pipa gas (SR, SK)	10	16	24	10	19	9	24	15	29	23	21	18
Kebocoran pada meteran gas	34	14	25	29	25	22	19	24	22	30	27	32
Jalur gas ke kompor mati	4	4	2	2	5	9	3	3	5	11	9	6
Konversi kompor	3	1	1	1	1	-	2	2	-	1	2	-
Komplain kubikasi	10	19	26	28	16	34	19	32	24	26	37	44
Perubahan data pelanggan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1
Lain-lain	13	4	1	5	8	7	13	16	8	12	9	14
Jumlah	76	59	79	76	77	82	80	95	91	104	106	115

Sumber : Diolah penulis dari formulir pengaduan keluhan warga kepada PD. Petro Prabu

Di dalam poin lain-lain pada tabel tersebut, memuat keluhan masyarakat seperti pembayaran retribusi gas bumi yang ganda, pipa gas tidak ditimbun di dalam tanah, tagihan retribusi gas bumi yang terlalu besar melebihi jumlah pemakaian, tidak bisa membayar tagihan retribusi gas bumi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa jaringan gas rumah tangga yang mengalami ledakan karena kebocoran gas.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2017, terdapat 1.040 pengaduan dan keluhan dari warga Kota Prabumulih selaku penerima manfaat kebijakan ini. Dimana, untuk menerima seluruh pengaduan tersebut hanya ditugaskan pada 2 orang pegawai di Kantor PD. Petro Prabu. Hal ini yang membuat penerimaan pengaduan permasalahan penggunaan jaringan gas bumi yang dilaporkan oleh warga menjadi lamban.

Penyelesaian permasalahan tersebut juga menjadi lamban dikarenakan jumlah petugas yang bertindak untuk menindaklanjuti laporan tersebut hanya ada 8 orang. Petugas yang bertindak menindaklanjuti laporan warga tersebut merupakan petugas yang juga melakukan pencatatan meter pemakaian gas bumi oleh warga yang hanya berjumlah 1 orang untuk setiap kecamatannya. Selain itu, penyelesaian laporan bulanan mengenai pengelolaan dan perawatan jaringan gas bumi ini terkadang tidak sesuai dengan jadwal. Hal ini dikarenakan jumlah laporan warga yang cukup banyak dan prioritas utamanya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tujuan dari Kebijakan Jaringan Gas Bumi adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah. Namun, dalam proses implementasinya, terdapat beberapa kendala yang membuat pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah di Kota Prabumulih tidak diimplementasikan dengan optimal oleh PD. Petro Prabu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih merupakan pembangunan dalam rangka diversifikasi energi dengan skala yang besar. Namun jumlah sambungan gas rumah tangga yang besar tersebut tidak diikuti dengan jumlah SDM yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian ilmu administrasi negara, khususnya untuk konsentrasi kebijakan publik.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah untuk membantu memberikan informasi bagi PD. Petro Prabu dalam mengimplementasikan Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.2015. *Buku Jargas (Jaringan Gas / City Gas) Indonesia*. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- D, Riant Nugroho.2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Dunn, William N.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Soenarko..2000.*Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*
- Winarno, Budi.2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih.2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hamdi, Muchlis.2014. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Abidin, Said Zainal.2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo.2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono, A.G.2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sekaran, Uma.2007.*Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Creswell, John W.2010.*Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi.2011.*Kebijakan Publik*.Yogyakarta : Media Pressindo.
- Widya, Yrama.2010.*Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan & Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.Bandung : Yrama Widya.

Peraturan / Perundang - Undangan

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4822/k/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT. Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016.

Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 152/KPTS/DPELH.III/2013 tentang Pemberian Wewenang Kepada PD. Petro Prabu Untuk Mengelola Program Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih.

Skripsi

Mardhotillah, Ade Dina.2016.*Implementasi Program Pengaliran Gas Rumah Tangga di Kota Palembang*.Skripsi.Inderalaya:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Rodansa, Muhamad.2017.*Implementasi Strategi Pemasangan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga oleh PT. Pertagas Niaga di Kota Prabumulih*.Skripsi.Inderalaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Kristiawati, Eka Mai.2015.*Implementasi Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*.Skripsi.Surabaya :Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Dokumen

Surat Perjanjian Pengelolaan Jaringan Gas Kota Untuk Lokasi Prabumulih Antara PT. Pertagas Niaga dengan PD. Petro Prabu Nomor 006/PN1000/2017-S2.

Dokumen Teknis Standar Operasi Prosedur Kepada Konsumen Pengguna Jaringan Pipa Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Prabumulih

Internet

Artikelsiana.2015. *Kebijakan Publik : Pengertian, Contoh, Ciri-Ciri, Perumusan & Tujuan*. <http://www.artikelsiana.com/2015/11/kebijakan-publik-pengertian-contoh-ciri.html>. Diakses pada tanggal 9 September 2017.

Satria, Ase.2015. *Definisi Implementasi dan Teori Implementasi oleh Para Ahli di Dalam Sebuah Kebijakan*. <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html>. Diakses pada tanggal 25 September 2017.